

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DIBIDANG PENDIDIKAN DI DESA SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
HAJAR HARI ANTORO
NIM. E01111051

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015.

Email : hajarhariantoro92@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan PKH di desa Sungai Kakap memiliki hambatan seperti kurangnya jumlah pendamping PKH di kecamatan Sungai Kakap, pelimpahan wewenang yang kurang jelas dalam penentuan penerima bantuan PKH, dan jumlah bantuan tunai PKH di desa Sungai Kakap terlalu sedikit. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dibidang Pendidikan, dalam menganalisis efektivitas tersebut menggunakan ukuran efektivitas yang univariasi menurut R.M Steers dengan variabel produktivitas dan keseluruhan prestasi sehingga dapat diketahui efektivitas PKH bidang pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 2 pengukuran efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap yaitu produktivitas dan keseluruhan prestasi, pelaksanaan Program Keluarga Harapan di bidang Pendidikan di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya masih kurang efektif, hal tersebut diketahui berdasarkan aspek produktivitas bahwa pelaksanaan PKH di bidang pendidikan di desa Sungai Kakap tidak produktif, karena belum mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi penerima bantuan PKH serta belum bisa meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan dari aspek keseluruhan prestasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH dibidang Pendidikan di desa Sungai Kakap tidak berprestasi, karena masih belum sepenuhnya tepat sasaran sesuai dengan kriteria PKH dan belum mampu mencapai tujuan PKH bidang pendidikan. Saran dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan PKH selanjutnya, pendamping PKH harus berperan aktif dalam melaksanakan tugas rutin dan perlu adanya penambahan pendamping PKH yang memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya.

Kata-kata Kunci : PKH, Efektivitas Pelaksanaan Program, Bidang Pendidikan.

Abstract

The implementation of PKH in Sungai Kakap have three obstacles; the less in number of the companion, the unclear description in terms of PKH recipient determination, and the nominal of the PKH program which too little. The research is in purpose of knowing and analyzing the effectivity of PKH implementation in the field of education; in reference to analyze the effectivity, the researcher uses univariate effectivity scale accordingly to R.M Steers with productivity variable and the entire achievement so that the effectivity of PKH in the field of Education can be found. The research is conducted based on Qualitative approachment which is descriptive method. The result of the study based on the two implemented effectivity assesment of PKH in the field of Education in Sungai Kakap, Kubu Raya Regency; productivity and the entire performance; could be concluded that the implementation of PKH in the field of education in Sungai Kakap Kubu Raya Regency is less effective. it is noticed accordingly to the productivity aspect which shows the implemantation of PKH in the field of education in Sungai Kakap is not productive since it enables improve the education quality of the PKH receipient; and improve the acces, education service quality and the whole performance aspect proved that the implementation of PKH in the field of education in Sungai Kakap is not accomplished. It is happen since the program is not entirely reflect to correct target based on the PKH criteria, therefore it can be able to reach the goal of PKH in the field of education. The advance suggestion and recomendation toward the implementation of PKH in the future; taking a part actively as a companion in terms of implementing the daily duty and the additional companion who has strong commitment for doing the responsibilities is needed.

Keywords : PKH, Program Implementation Productivity, Education field

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan sudah menjadi masalah umum yang dialami oleh semua negara di dunia, tidak terkecuali di negara Indonesia. Masalah kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus menerus. Ini bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama dan masih hadir ditengah-tengah kita saat ini, tetapi karena kini gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang masih dihadapi bangsa Indonesia. Hal ini juga dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahun, sehingga tingkat kesejahteraan rakyatnya masih jauh dibawah tingkat kesejahteraan sosial. Kemiskinan seyogyanya digambarkan dengan kondisi seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti, sandang, pangan dan papan. Kurangnya pendapatan mengakibatkan seseorang memiliki kualitas hidup yang rendah. Hal ini disebabkan orang miskin tidak memiliki biaya untuk mengakses berbagai layanan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang memadai, mengakses kesehatan yang terjangkau dan kemiskinan menjadi alasan rendahnya

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik kabupaten Kubu Raya tahun 2015, di kabupaten Kubu Raya terdapat sekitar 337.000 penduduk yang tergolong miskin dengan persentase 6,67% dengan penghasilan rata-rata perkapita perbulannya berkisar Rp. 227.635,-.

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan dengan meluncurkan beberapa program pemberdayaan masyarakat miskin seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Beras Bersubsidi (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan program yang paling dikenal oleh masyarakat luas belum lama ini yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM).

Kemudian upaya dalam meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial khususnya kemiskinan yang terus bertambah dari hari ke hari maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan mulai dilaksanakan di kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 yang meliputi tujuh kecamatan yaitu kecamatan Sungai Raya, Ambawang, Batu Ampar, Rasau Jaya, Kubu, Terentang, dan Sungai Kakap.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), jika mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Tujuan PKH (Kemensos, 2007) terdiri atas:

- a) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi KSM.
- b) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM.
- c) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak di bawah 6 tahun dari KSM.
- d) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi KSM.

Ketentuan untuk peserta penerima bantuan PKH dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut (Kemensos, 2015), yaitu :

- a) Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita.
- b) Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
- c) Anak usia SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun).
- d) Anak SLTP/MTs/Paket B/SMLB (Usia 12-15) dan SLTA/ sederajat.
- e) Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas.

Besaran bantuan tunai untuk peserta PKH bervariasi tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam penerimaan bantuan. Adapun besaran bantuan per KSM pertahun yaitu : Bantuan tetap Rp. 500.000, bantuan bagi KSM yang memiliki : Ibu Hamil/ Menyusui/ Anak usia dibawah 6 tahun Rp. 1.000.000, anak SD dan yang sederajat Rp. 450.000, anak SMP dan yang sederajat Rp. 750.000, anak SMA dan yang sederajat Rp. 1.000.000, bantuan minimum per KSM Rp. 950.000, bantuan maksimum per KSM Rp. 3.700.000. Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan yaitu mengikuti kehadiran disatuan pendidikan/ rumah singgah minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. Semua peserta wajib menjalankan kewajiban, apabila tidak memenuhi kewajiban maka jumlah bantuan yang diterima akan dikurangi bahkan bantuan dapat dihentikan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Steers (1985:159) mengungkapkan bahwa, jika efektivitas dipandang dari sudut tercapainya tujuan operatif dan operasional maka jelas bahwa tanggungjawab utama para manajer adalah memastikan bahwa usaha yang diarahkan pada pencapaian tujuan ini adalah maksimum, bagaimanapun

bentuknya. Dalam mengukur suatu keberhasilan program memang tidak mudah, karena peneliti menyadari ukuran-ukuran ataupun teori efektivitas dari waktu ke waktu memiliki variabel yang mencolok perbedaannya. Kemudian Steers (1985:207) mengungkapkan jika topik yang berkaitan dengan efektivitas masih bersifat abstrak, maka ditekankan pada proses-proses pokok yang berhubungan dengan efektivitas, dan tidak memandang efektivitas sebagai hasil akhir. Peranan penting manajemen adalah memahami bagaimana berbagai komponen organisasi saling berhubungan satu sama lain dan hubungan ini dapat memperbesar kemungkinan berhasilnya organisasi.

Tiga dimensi utama dari model ini (Steers,1985:208) adalah : 1) konsep optimasi tujuan, 2) perspektif sistem, dan 3) tekanan pada perilaku manusia dalam susunan organisasi. Kemudian ukuran-ukuran efektivitas yang univariasi menurut Steers dalam bukunya yang berjudul efektivitas organisasi (1985:45) mengemukakan bahwa hal yang paling menonjol dalam mengukur efektivitas adalah :

a) Keseluruhan Prestasi, dalam istilah lain yaitu efektivitas keseluruhan yaitu sejauhmana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya. Penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria

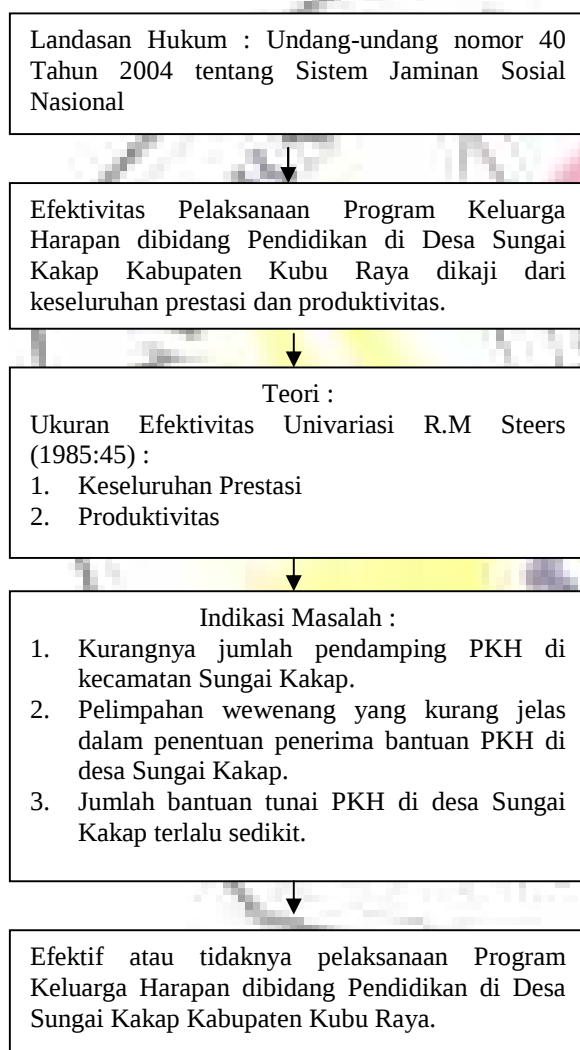
tunggal dan menghasilkan penilaian umum mengenai efektivitas organisasi.

- b) Produktivitas, kuantitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi. Dapat diukur menurut tiga tingkatan : tingkat individual, kelompok, dan keseluruhan organisasi. Ini bukan ukuran dari efisiensi, tidak ada perhitungan nisbah biaya dan keluaran.
- c) Kepuasan Kerja Pegawai, tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.
- d) Laba atau tingkat penghasilan dari penanaman modal, penghasilan atau penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan organisasi dilihat dari sudut pandangan si pemilik. Jumlah dari sumber-daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi, kadang-kadang dinyatakan dalam prosentase.
- e) Keluarnya karyawan, frekuensi atau jumlah pekerja dan keluar atas permintaannya sendiri.

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 2 variabel, yaitu keseluruhan prestasi dan produktivitas, karena hanya variabel tersebut lebih mudah untuk

dipahami. Alasan untuk tidak menggunakan variabel 3) kepuasan kerja pegawai, 4) laba atau tingkat penghasilan dari penanaman modal, dan 5) keluarnya karyawan, karena kurang relevan untuk digunakan dalam mengukur efektivitas di instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan organisasi non-provit.

Gambar 1.
Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka. Selanjutnya digunakan teknik deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan tentang bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan dibidang Pendidikan di desa Sungai Kakap kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi untuk melakukan penelitian. Dalam menganalisis data, digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Dalam uji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana peneliti akan mengambil dan menggabungkan serta memeriksa data berdasarkan hasil observasi/pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Produktivitas

Dalam menganalisis dan menilai produktivitas bantuan PKH dapat dilihat

dari proses pelaksanaan untuk mencapai tujuan PKH. Adapun tujuan PKH bidang pendidikan antara lain : meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KSM, dan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan. Didalam tujuan PKH khususnya bidang Pendidikan disebutkan bahwa tujuan PKH yaitu untuk meningkatkan taraf pendidikan supaya dapat membantu anak-anak penerima bantuan PKH untuk dapat menyelesaikan wajib belajar sampai tingkat SLTA/ sederajat. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di desa Sungai Kakap ditemukan bahwa pelaksanaan PKH di desa Sungai Kakap belum mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi penerima bantuan PKH itu sendiri. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya jumlah anak putus sekolah di desa Sungai Kakap. Diketahui bahwa jumlah anak putus sekolah di kecamatan Sungai Kakap masih sangat tinggi yaitu dengan jumlah anak putus sekolah sebanyak 1959 anak, dengan jumlah anak putus sekolah untuk tingkat SD/ sederajat sebanyak 1363 anak, SLTP/ sederajat sebanyak 326 anak, dan jumlah anak SLTA/ sederajat sebanyak 270 anak. Bahkan dari 8 penerima bantuan PKH masih ada penerima bantuan PKH yang anaknya putus sekolah. Menurut hasil penelitian, penyebab dari tingginya anak putus sekolah di kecamatan Sungai Kakap

ini dikarenakan oleh kurangnya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan bagi anak mereka, dan kurangnya minat dari anak untuk bersekolah. Dalam pelaksanaan PKH, pendamping PKH sangat berperan dalam tercapainya tujuan PKH dibidang pendidikan. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ternyata pendamping PKH kurang berperan dalam tercapainya tujuan PKH karena pendamping PKH tidak melaksanakan tugas seperti berkunjung ke rumah penerima bantuan PKH sehingga sampai saat ini masih banyak penerima bantuan PKH yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka dan kurangnya minat dari anak penerima bantuan PKH untuk bersekolah. Berdasarkan dengan hasil observasi, wawancara, serta mengamati data studi jumlah anak putus sekolah di kecamatan Sungai Kakap yang masih tinggi ada beberapa hal yang ditemukan oleh peneliti, yaitu pelaksanaan PKH di desa Sungai Kakap belum memberikan dampak terhadap peningkatan taraf pendidikan penerima bantuan PKH karena ditemukan bahwa masih ada 3 orang anak penerima bantuan PKH yang masih putus sekolah. Kemudian ditemukan bahwa pendamping PKH kurang berperan dalam tercapainya tujuan PKH karena pendamping PKH tidak melaksanakan tugasnya seperti berkunjung ke rumah penerima bantuan PKH sehingga sampai saat ini masih banyak penerima

bantuan PKH yang kurang sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka dan kurangnya minat dari anak penerima bantuan PKH untuk bersekolah.

Tujuan PKH dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan semestinya pendamping PKH dapat berperan aktif dalam mempermudah akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak-anak penerima bantuan PKH. Sesuai dengan tugas pendamping PKH disebutkan bahwa selanjutnya, jadwal pendampingan dilakukan rutin dan ditetapkan selama 4 hari kerja (Senin-Kamis). Kegiatan yang dilakukan selama itu antara lain melakukan kunjungan ke unit pelayanan pendidikan, serta mengunjungi keluarga untuk membantu mereka dalam proses mendaftarkan anak-anak ke sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di desa Sungai Kakap, ternyata pendamping PKH tidak berperan dalam pendampingan rutin yaitu melakukan kunjungan ke unit pendidikan, mengunjungi keluarga untuk membantu mereka dalam proses mendaftarkan anak-anak ke sekolah, untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada tiga orang penerima bantuan PKH ternyata pendamping PKH kurang berperan dalam pelaksanaan PKH yakni melakukan kunjungan ke unit pendidikan, mengunjungi keluarga untuk membantu mereka dalam

proses mendaftarkan anak-anak ke sekolah, karena berdasarkan keterangan dari ketiga penerima bantuan PKH, pendamping PKH kecamatan Sungai Kakap hanya meminta raport dan kartu pelajar sebagai syarat untuk mengambil dana bantuan PKH saat pencairan dana bantuan PKH di kantor pos dan tidak membantu proses pendaftaran anak-anak penerima bantuan PKH di desa Sungai Kakap.

2. Keseluruhan Prestasi

Dalam pelaksanaan PKH itu sendiri sebelumnya telah memiliki kriteria dalam penentuan penerima bantuan PKH, antara lain :

- a) Memiliki ibu hamil/ nifas/ anak balita.
- b) Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah).
- c) Memiliki anak usia SD/Sederajat.
- d) Memiliki anak usia SLTP/Sederajat; memiliki anak usia SLTA/Sederajat.
- e) Memiliki anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas, yang semua itu merupakan KSM.

Berdasarkan hasil observasi dalam pelaksanaan PKH dibidang pendidikan di desa Sungai Kakap yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa pelaksanaan PKH kurang efektif karena menurut data dari 1202 KK penduduk miskin hanya 8 orang yang menjadi penerima bantuan PKH

dan dari 8 penerima bantuan PKH ini ternyata tidak semuanya layak mendapatkan bantuan PKH. Berdasarkan hasil observasi mengenai kondisi 8 orang penerima bantuan PKH di desa Sungai Kakap hanya 5 orang yang tergolong layak mendapatkan bantuan PKH dan 3 orang penerima bantuan PKH tidak layak untuk mendapatkan bantuan PKH. Dari 5 orang penerima bantuan PKH, mereka dikatakan layak karena memiliki kriteria sebagai penerima bantuan PKH. Sedangkan dari 3 orang penerima bantuan PKH dinyatakan tidak layak karena mereka memiliki kondisi ekonomi yang cukup, salah satunya berprofesi sebagai PNS dan memiliki usaha fotokopi dan tidak tergolong sebagai KSM. Selanjutnya menurut hasil observasi peneliti terhadap peran pendamping PKH kecamatan Sungai Kakap ditemukan bahwa pendamping PKH kurang berperan aktif dalam melaksanakan tugas rutin pendamping PKH, karena hanya menyampaikan informasi tentang pencairan dana bantuan PKH dikantor pos melalui pesan singkat tanpa melakukan beberapa tugas rutin pendamping PKH lainnya. Menurut hasil wawancara dengan kepala UPT dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan Sungai Kakap tersebut ditemukan bahwa dalam pelaksanaan PKH di kecamatan Sungai Kakap mulai dari tahun 2013 hingga sekarang (tahun 2015) ternyata tidak ada koordinasi antara

pendamping PKH kecamatan Sungai Kakap dengan pihak UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan Sungai Kakap, namun menurut kepala UPT dinas Pendidikan dan Kebudayaan kecamatan Sungai Kakap program bantuan pemerintah untuk siswa miskin masih belum berjalan baik dikarenakan penentuan ditentukan oleh pusat sehingga tidak tepat sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di desa Sungai Kakap ternyata pelaksanaan PKH belum berprestasi, karena dalam pelaksanaan PKH belum mampu mencapai tujuan PKH. Didalam tujuan PKH khususnya bidang Pendidikan disebutkan bahwa tujuan PKH yaitu untuk meningkatkan taraf pendidikan supaya dapat membantu anak-anak penerima bantuan PKH untuk dapat menyelesaikan wajib belajar sampai tingkat SLTA/ sederajat.

Namun, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di desa Sungai Kakap ditemukan bahwa pelaksanaan PKH di desa Sungai Kakap belum mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi penerima bantuan PKH itu sendiri. Hal tersebut ditandai dengan jumlah anak putus sekolah di kecamatan Sungai Kakap masih sangat tinggi yaitu dengan jumlah anak putus sekolah sebanyak 1959 anak, dengan jumlah anak SD/ sederajat sebanyak 1363 anak, SLTP/ sederajat sebanyak 326 anak, dan jumlah anak SLTA/ sederajat sebanyak

270 anak. Bahkan dari 8 penerima bantuan PKH masih ada penerima bantuan PKH yang anaknya putus sekolah. Adapun penyebab dari tingginya anak putus sekolah di kecamatan Sungai Kakap ini dikarenakan oleh kurangnya kesadaran orangtua akan pentingnya pendidikan bagi anak mereka, dan kurangnya minat dari anak untuk bersekolah. Hal ini disebabkan karena pendamping PKH kurang berperan dalam tercapainya tujuan PKH yaitu pendamping PKH tidak melaksanakan tugas seperti berkunjung ke rumah penerima bantuan PKH sehingga pendamping PKH tidak bisa mensosialisasikan kepada penerima bantuan PKH akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka dan tidak bisa memotivasi anak-anak penerima bantuan PKH untuk menyelesaikan wajib belajar sampai tingkat SLTA/ sederajat.

Dalam pelaksanaan PKH untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan di desa Sungai Kakap ternyata masih belum berprestasi. Karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa masih ada anak dari penerima bantuan PKH yang belum mendapatkan kemudahan untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Hal ini disebabkan karena pendamping PKH tidak berperan dalam pendampingan rutin yaitu melakukan kunjungan ke unit pelayanan kesehatan dan pendidikan, mengunjungi keluarga untuk membantu mereka dalam

proses mendaftarkan anak-anak ke sekolah, untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian tentang efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dibidang Pendidikan di desa Sungai Kakap kabupaten Kubu Raya antara lain sebagai berikut :

1. Produktivitas

Pelaksanaan PKH dibidang pendidikan di desa Sungai Kakap tidak produktif, karena belum mampu meningkatkan taraf pendidikan bagi penerima bantuan PKH serta belum bisa meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan.

2. Keseluruhan Prestasi

Pelaksanaan PKH dibidang Pendidikan di desa Sungai Kakap tidak berprestasi, karena masih belum sepenuhnya tepat sasaran sesuai dengan kriteria PKH dan belum mampu mencapai tujuan PKH bidang pendidikan.

Berdasarkan 2 pengukuran efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan dibidang Pendidikan di desa Sungai Kakap kabupaten Kubu Raya yaitu produktivitas, dan keseluruhan prestasi,

maka ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dibidang Pendidikan di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya masih kurang efektif.

b) Saran

Adapun saran yang diberikan untuk pelaksanaan PKH selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Pendamping PKH harus berperan aktif dalam melaksanakan tugas rutin pendamping PKH seperti pertemuan awal, mendampingi proses pembayaran, berdiskusi dalam kelompok, pendampingan rutin, berkunjung ke rumah penerima bantuan, memfasilitasi proses pengaduan, mengunjungi penyedia layanan, meningkatkan kapasitas diri, melakukan konsolidasi.
2. Perlu adanya penambahan pendamping PKH yang memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya sehingga pendamping PKH mampu melaksanakan tugas rutin pendamping PKH dan mampu mencapai tujuan PKH.

Awang, Azam. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Berg, Bruce L. 2007. *Qualitative research methods for the social science*. Boston : Pearson Education, Inc.

Handyaningrat, Soewarno. 1992. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Gunung Agung : Jakarta.

Indrawijaya, Adam I. 2000. *Perilaku Organisasi*. Sinar Baru : Bandung.

Kurniawan, Agus. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaharuan : Yogyakarta.

Martani dan Lubis. 1987. *Teori Organisasi*. Ghalia Indonesia : Bandung.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.

-----, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya : Bandung.

M. Steers, Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga : Jakarta.

Nawawi, Hadari. 2000. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. University Press : Yogyakarta.

Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. RajaGrafindo Persada : Jakarta.

Ndraha, Talidizihu. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Rineka Cipta : Jakarta.

S.P Siagian. 1978. *Administrasi Pembangunan: konsep, dimensi dan strateginya* Jakarta : Gita Karya

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung.

F. REFERENSI

1. Buku-Buku

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.

-----, 2010. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Alfabeta : Bandung.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama : Jakarta.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI : Bandung.

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Erlanga : Jakarta.

2. Sumber Lain :

BPS. 2015. *Kriteria Kemiskinan*. Diambil pada tanggal 14 maret 2015 dari [http://www.dinsos.pemdadiy.go.id/index.php\(06-08-2010\)](http://www.dinsos.pemdadiy.go.id/index.php(06-08-2010))

Kementerian Sosial RI - Mari Kita Mengenal Program PKH. 2015. Diambil pada tanggal 13 maret 2015 dari <file:///D:/DOKUMEN/TINJAUAN%20PKH/Kementerian%20Sosial%20RI%20%20MARI%20KITA%20MENGENAL%20PROGRAM%20PKH.htm>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Hajar Hari Antoro
NIM / Periode lulus : E01111051
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : hajarhariantoro92@gmail.com

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal PublikA*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI BIDANG
PENDIDIKAN DI DESA SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ Secara *fulltex*
☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 20 Januari 2016

Hajar Hari Antoro
NIM. E01111051

Catatan :

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)